

# MEMBANGUN KOMUNIKASI POLITIK YANG ETIS

PARYATI SUDARMAN

## Abstrak

*Komunikasi politik dan etikanya secara keseluruhan akan lebih mudah difahami apabila dihubungkan dengan dimensi politik dengan segala aspek dan problematikanya. Komunikasi dalam politik, dipandang lebih luas, karena meliputi seluruh pertukaran pesan baik verbal maupun nonverbal, formal maupun nonformal, baik dalam suprastruktur, infrastruktur, maupun substruktur, dan tidak hanya komunikasi yang dilakukan secara personal, melainkan juga kelompok, kelompok masyarakat, bahkan juga bangsa dan negara.*

**Kata Kunci :** dimensi politik

## A. Pendahuluan

Pada umumnya komunikasi politik dilakukan untuk memperoleh sesuatu kekuasaan. Kekuasaan digunakan untuk mempengaruhi, mengatur, bahkan memaksa dalam mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Keinginan suatu bangsa pada dasarnya adalah terbebas dari segala bentuk penjajahan, sehingga hidup damai, aman, tentram, sejahtera baik lahir maupun batin, atau dalam derajat paling puncak keindahan hidup bersama adalah kondisi/keadaan *baldatun toyyibatun warrobbul ghoffur*, yaitu masyarakat yang aman, tertib, damai, sejahtera dibawah lindungan serta ampunan Tuhan Yang Maha Essa.

Keadaan demikian tentu tidaklah mudah dicapai, terlebih dalam suatu negara demokrasi, yang menganut sistem dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Perspektif komunikasi politik memandang demokrasi dibutuhkan oleh seluruh bangsa di dunia, yang pada umumnya memiliki komitmen tentang kesetaraan, keadilan, dan menjunjung tinggi hak azasi manusia, termasuk hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Komunikasi yang demokratis, dengan hirarki atau struktur yang berbeda atau golongan yang berlainan, dapat mengeliminasi atau mendominasi antara satu atas lainnya, dan kekuasaannya

digunakan untuk mengontrol dalam pencapaian tujuan bersama. Bila dilihat realitas dari keseluruhan komponen yang terlibat dalam proses komunikasi terdiri atas: sumber, pesan, media, khalayak, dan *feedback*.

Jika kita amati, tampak adanya ketidak harmonisan dalam “dialektika” komunikasi politik kita akhir-akhir ini menjelang Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2014. Berbagai cara, penyalahgunaan wewenang, kekuasaan, ketidakadilan dirasakan diberbagai lini kehidupan masyarakat. Lemahnya penegakkan hukum, tercermin dari tidak adanya kepastian hukum itu sendiri dan ada kecenderungan diskriminatif dan main hakim sendiri. Selain itu juga banyak oknum penegak hukum yang justru melanggar hukum, seperti kasus suap, korupsi, narkoba dan tindakan asusila lainnya. Hal ini tentu terjadi karena beberapa sebab, antara lain yaitu: 1) kurang fahamnya elit politik tentang etika berdemokrasi yang baik. Hal ini membuat persaingan politik mudah berubah menjadi konflik. Konflik-konflik antar elite politik, bisa berbuntut pada balas dendam disertai kekerasan. Kurang sportifnya para elite politik dalam berdemokrasi, sering diakhiri dengan balas dendam dan kekerasan, yang dianggap sebagai wujud kebebasan individu dalam berdemokrasi. Demokrasi ini adalah demokrasi simbolistik, karena kebebasan individu tanpa batas, hukum bisa dibeli, yang justru akan mengancam keberlangsungan berdemokrasi itu sendiri. Karena akan berubah menjadi anarkis, seperti yang sering kita saksikan dalam berbagai tayangan televisi dewasa ini. Misalnya terjadinya pemukulan terhadap sesama dewan, pemakian kata-kata sarkastis, kotor, propaganda hitam,

pemukulan kepada seorang menteri oleh seorang anggota DPR yang disebabkan konflik internal partai mereka, belum lagi dikalangan infrastruktur alias rakyat bawah, Pemilukada seringkali diakhiri dengan “adu jotos” karena yang kalah tidak puas dengan penyelenggaraannya yang penuh intrik dan kebohongan. Selama ini wawasan kebangsaan elite politik semakin nyata masih masih rendahnya moral kebersamaan dan kebangsaan di kalangan elite politik, sehingga mudah menyulut konflik-konflik. Tidak hanya antar elite politik, tetapi juga rakyat, birokrat yang pada umumnya mereka masih berdasarkan perbedaan ideologi, kepentingan sesaat, dan kepentingan pribadi yang melatarbelakanginya sehingga yang muncul pun adalah kepentingan pribadi dan kelompok ketimbang mementingkan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara; 2) rendahnya moral dan kejujuran di kalangan elit politik. Hal ini tercermin semakin maraknya kasus-kasus korupsi, memperkaya diri sendiri, yang dilakukan para elit di berbagai struktur, maraknya kasus narkoba politik uang, (*money politic*) pornografi, dan kasus-kasus lain yang dapat merusak tatanan masyarakat; 3) rendahnya moral kebangsaan, persatuan, dan kesatuan dikalangan elite politik. Hal ini tercermin dengan munculnya gerakan separatisme dan primordialisme kedaeraan yang sempit. 4) kurangnya keteladanan dari pemimpin demokratik (*democratic leader*). Padahal keteladanan pemimpin ini sangat diperlukan, dengan kemahirannya dalam berkomunikasi mampu menstimuli para pengikutnya memiliki daya arah, daya juang dan daya laksana. Penting rasanya para *democratic leader* bercermin kepada para pejuang pendahulu kita: Soekarno, Muhammad Hatta, Tan Malaka, Sutan Sjahrir dan nama-nama pejuang

lain pada intinya mereka orang berilmu, mereka berpolitik dan berideologi berdasarkan atas keyakinan, pengetahuan dan etika. Mereka ilmuwan berkarya dan bekerja membela kepentingan rakyat dari cengkraman penjajah dan bukan menjadi *Court Jesters* alias badut-badut penguasa; 5) pemahaman dan pengalaman ajaran agama dikalangan elite politik masih belum optimal. Hal ini tercermin belum optimalnya ajaran agama dijadikan sebagai sumber ajaran moral dan etika para elite politik dalam berpolitik, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pada umumnya agama baru dipahami dan diamalkan dalam ritual semata, sehingga belum menyentuh kesadaran dan kedalaman ajaran agama yang merupakan substansi yang paling urgen yang harus tercermin dalam gerak langkah, baik dalam berhubungan dengan sesama manusia dan Tuhan. Keyakinan, moral dan etika politik seharusnya mencerminkan manusia yang percaya dan meyakini kepada Tuhan yang senantiasa mengawasi seluruh gerak-gerik kehidupannya di manapun berada.

Komunikasi politik tanpa etika tentu berdampak buruk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terlebih memasuki era globalisasi seperti sekarang ini, dengan hadirnya teknologi komunikasi yang massif, komunikasi politik tidak hanya berlangsung dalam lingkup internal suatu negara (*intra societal environment*) tetapi juga melintas keluar batas wilayah negara (*extra social environment*) sehingga terjadi proses komunikasi nirmasa yang luar biasa, tidak hanya komunikasi antar negara, antar bangsa yang terbuka tetapi juga komunikasi personal. Menjelang pemilu 2014, demikian tinggi efektivitas komunikasi ini, sehingga seseorang, kelompok, pemerintah, negara, berusaha mencari cara yang fragmatis

dan sistematis dalam penyusunan, penyimpanan dan penyampaian pesan-pesan politik untuk menarik simpati serta dukungan berbagai pihak. Berbagai cara dilakukan, bahkan adakalanya diluar batas norma serta etika yang harusnya ditaati bersama. Dampaknya tentu kegagalan dari komunikasi politik itu sendiri yang bisa kehilangan kepercayaan (*trust*) dari masyarakat sebagai pemegang “kekuasaan” tertinggi dalam sistem demokrasi itu sendiri.

## B. Fungsi Komunikasi Politik

Sean Mac Bride sebagaimana yang dikutip oleh Soemarno AP dalam bukunya “Dimensi-Dimensi Komunikasi Politik, mengatakan bahwa,” *If communication is considered in its broadest sense, not only the exchange of news and messages but as an individual and collective activity embracing all transmission and sharing of ideas, facts and data, its main functions in any social system*”. Kemudian Bride memperinci fungsi dari komunikasi itu sendiri, yaitu: (1) sebagai fungsi informasi (*information function*). Fungsi ini terkait dengan pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, penyebaran berita, data, gambar, fakta, opini, komentar, yang dibutuhkan agar dapat dipahami secara jelas, terhadap kondisi nasional, internasional, lingkungan, orang lain, personal, agar dapat mengambil keputusan yang tepat; (2) fungsi sosialisasi (*socialization function*), hal ini terkait dengan pentingnya penyediaan sumber ilmu pengetahuan yang memungkinkan orang bersikap dan bertindak sebagai anggota masyarakat yang efektif sehingga ia sadar akan fungsi sosialnya dan dapat aktif dalam masyarakat; (3)

fungsi motivasi (*motivation function*), hal ini terkait dengan penjelasan tujuan tiap masyarakat dalam jangka pendek maupun jangka panjang, mendorong setiap individu untuk menentukan pilihan dan keinginannya, mendorong kegiatan individu dan kelompok berdasarkan tujuan yang akan dicapai bersama; (4) fungsi debat dan diskusi (*debate and discussion function*), yaitu fungsi menyediakan dan saling menukar fakta yang diperlukan untuk memungkinkan persetujuan atau menyelesaikan perbedaan pendapat mengenai masalah publik, menyediakan bukti-bukti yang relevan yang diperlukan untuk kepentingan umum agar masyarakat lebih melibatkan diri dalam masalah yang menyangkut kepentingan bersama baik ditingkat lokal, nasional bahkan internasional; (5) fungsi pendidikan (*educational function*), hal ini terkait dengan pengalihan ilmu pengetahuan yang dapat mendorong perkembangan intelektual, pembentukan watak dan pendidikan keterampilan dan kemahiran yang diperlukan dalam seluruh bidang kehidupan; (6) memajukan kebudayaan (*cultural promotion*), hal ini terkait penyebarluasan hasil kebudayaan dan seni dengan maksud melestarikan warisan masa lampau, membangun kreativitas, imajinasi dan pengenalan estetika; (7) hiburan (*entertainment*), penyebaran lambang-lambang, slogan, iklan, komedi, dan lain sebagainya; (8) Integritas (*integration*), menyediakan bagi individu, kelompok, suku bangsa, berkesempatan memperoleh berbagai pesan yang mereka perlukan agar terwujudnya saling pengertian, dan saling menghargai, menyamakan persepsi dan pandangan serta keinginan bersama tanpa merugikan pihak-pihak lain. Fungsi-fungsi tersebut tentu harus ada baik dalam pemerintahan, struktur

formal (suprastruktur) maupun juga pada masyarakat (infrastruktur)

### Perluasan Makna Politik

Sejak zaman Yunani kuno, orang telah berpolitik. Kata politik telah dikenal dengan nama "*politike techne*" yang berarti kemahiran politik. Politik berasal dari kata "polis" yang berarti "negara kota", yaitu secara totalitas merupakan kesatuan antara negara (kota) dan masyarakatnya. Kemudian kata "*polis*", berkembang menjadi "*politicos*" yang berarti kewarganegaraan. Dari kata "*politicos*" menjadi "*politera*" yang berarti hak-hak kewarganegaraan. Dewasa ini pengertian politik menjadi lebih luas yaitu pelaksanaan hak-hak warga negara dalam turut serta dan berperan dalam mengambil bagian pada pemerintahan (Soemarno AP, hlm. 8) David Easton and J.Denis menyatakan bahwa, "*Political as a process those developmental process through which person acquire political orientation and patterns of behavior*". Ossip K. Flechtheim menyimpulkan negara sebagai suatu persekutuan hidup atau institusi yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur warga negaranya dalam mencapai tujuan dan kesejahteraan bersama. Astrid S.Soesanto mendefinisikan bahwa komunikasi politik adalah komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa, sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini, dapat mengikat semua warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik".

### C. Pentingnya Etika dalam Komunikasi Politik

S. Jack Odell, mengatakan bahwa, "sebuah masyarakat tanpa etika adalah masyarakat yang menjelang kehancuran. Secara etimologik, etika berasal dari kata Yunani "Ethos" yang berarti watak kesusilaan atau adat. Secara bahasa, etika berasal dari bahasa Inggris *ethic*, bersumber dari Bahasa Latin "ethicus" yang berarti himpunan asas-asas tentang nilai atau moral. Etika adalah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran. Dalam arti luas etika berarti cabang filsafat mengenai nilai-nilai dalam kaitannya dengan perilaku manusia, apakah tindakannya itu benar atau salah, baik atau buruk. Dengan kata lain, etika adalah filsafat moral yang menunjukkan bagaimana seseorang itu harus bertindak. Dalam arti sempit etika diartikan sebagai himpunan asas-asas nilai atau moral. Dan moral itu berlaku bagi semua aktivitas kehidupan termasuk komunikasi politik di dalamnya. Kenneth E Andersen dalam bukunya *Introduction to Communication Theory and Practice* menyatakan bahwa etika adalah, "Suatu studi tentang nilai-nilai dan landasan bagi penerapannya, etika bersangkutan dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai apa itu kebaikan atau keburukan dan bagaimana seharusnya". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika diartikan sebagai: (1) ilmu tentang apa yang "baik" dan apa yang "buruk" dan tentang apa hak dan kewajiban moral; (2) kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; (3) nilai mengenai benar atau salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Menurut Verdeber, etika adalah standar-

standar moral yang mengatur perilaku kita. Istilah etika diartikan sebagai suatu perbuatan standar (*standard of conduct*) yang memimpin individu berbuat sesuatu. Dalam Encyclopedia Britannica, etika dinyatakan dengan tegas sebagai filsafat moral, yaitu studi sistematis mengenai sifat dasar dari konsep-konsep nilai baik, buruk, benar salah dan sebagainya. Aristoteles menggunakan kata etika ini menunjukkan filsafat moral, yaitu ilmu tentang apa yang bisa dilakukan atau tidak bisa dilakukan. Dari beberapa definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa paling tidak ada tiga arti penting terkait dengan etika, yaitu etik: (1) sebagai nilai-nilai moral dan norma-norma moral yang menjadi rujukan bagi setiap orang atau suatu kelompok dalam mengatur perilakunya, atau disebut dengan "sistem nilai"; (2) sebagai kumpulan asas atau nilai moral yang seringkali dikenal dengan "kode etik"; (3) sebagai ilmu tentang yang baik atau buruk, yang seringkali disebut dengan filsafat moral. Etika bersifat abstrak dan berkenaan dengan persoalan "baik" "buruk". Sedangkan komunikasi politik bersifat pragmatis, akan nampak akan baik atau buruknya komunikasi politik itu. Etika dan moral itu sama artinya, tetapi dalam pemakaian sehari-hari ada sedikit perbedaan. Moral atau moralitas dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika dipakai untuk pengkajian sistem yang ada. Misalnya (1) Perbuatan itu bermoral, (2) sesuai dengan norma etika. Secara umum sebagaimana yang disampaikan oleh Denhardt nilai-nilai moral nampak dari enam nilai besar atau yang dikenal dengan "*six great ideas*", yaitu nilai-nilai kebenaran (*truth*), kebaikan (*goodness*), keindahan (*beauty*), kebebasan (*liberty*), kesetaraan (*equality*), dan keadilan (*justice*). Dalam kehidupan



bermasyarakat, seseorang sering dinilai apakah tutur kata, sikap dan perilaku sejalan dengan nilai-nilai tersebut atau tidak. Begitu pula dalam komunikasi politik, etika dalam tataran profesional standards (kode etik), atau "*right rules of conduct*" (aturan berperilaku yang benar) yang harus dipatuhi oleh semua pihak termasuk politisi.

Berbicara tentang etika, tak lepas dari nilai-nilai: kejujuran, kebenaran, kebaikan serta tanggungjawab, baik tanggungjawab diri maupun tanggungjawab sosial. Pada umumnya etika komunikasi dinilai dari tiga kriteria yang saling berkaitan yaitu: (1) maksud si pembicara, (2) sifat dari cara-cara yang diambil, dan (3) keadaan yang mengiringi. Ketiga faktor yang bergabung mempertinggi kepercayaan atau sebaliknya bisa meruntuhkan rasionalitas manusia dan kemampuannya untuk menentukan pilihan.

Unsur penting etika dalam komunikasi politik, adalah bahwa manusia harus sanggup dalam penilaian rasional, memotivasi manusia untuk melayani terutama kepentingan pribadi dan kepentingan orang lain. Taktik periklanan dan taktik rekrutmen harus dinilai berdasarkan sejauh mana mendorong manusia untuk mengambil keputusan yang rasional. Pada komunikasi antarpersona, dimana tampak kepribadian lebih segera, daripada komunikasi publik (massa), tentu hal ini dilakukan harus memenuhi standar etika untuk mencapai komunikasi politik yang etis. Pada tataran komunikasi antarpersona yang etis, yang harus dilakukan adalah: (1) penghormatan terhadap seseorang sebagai person tanpa memandang batasan usia, status, atau hubungan dengan pembicara; (2) penghormatan terhadap ide, perasaan, maksud, dan integritas orang lain; (3) sikap

suka memperbolehkan, keobjektifan, dan keterbukaan pikiran, yang mendorong kebebasan berekspresi; (4) penghormatan terhadap bukti dan pertimbangan yang rasional terhadap berbagai alternatif; dan (5) terlebih dahulu mendengarkan dengan hati-hati dan berempati serta simpati sebelum menyatakan persetujuan atau ketidaksetujuan. Dalam tataran profesi etika personal juga harus dilengkapi dengan profesi, organisasi, dan etika dalam berbangsa dan ber-negara.

Secara teoritis, dikenal beberapa aliran tentang etika, yaitu: Naturalisme, Hedonisme, Utilitarisme, Idealisme, Vitalisme dan Theologis. Pada aliran naturalisme, ukuran baik buruknya perbuatan seseorang jika perbuatan itu sesuai dengan naluri manusia itu sendiri. Aliran ini beranggapan bahwa kebahagiaan yang menjadi tujuan setiap manusia didapat dengan jalan memenuhi naluri itu. .... Tokoh aliran naturalisme adalah pemikir Yunani Zeno (340-264SM). Aliran hedonisme, yang menjadi ukuran baik menurut aliran ini adalah jika perbuatan itu menimbulkan kenikmatan, kelezatan (*hedone*). Menurut aliran ini manusia selalu menginginkan kelezatan (*hedone*). Sebenarnya kelezatan ini tidak hanya melekat pada manusia, bahkan hewan pun juga demikian dengan dorongan tabiatnya. Karenanya kelezatan merupakan tujuan hidup manusia maka jalan yang mengantarkan ke sana dipandang sebagai perbuatan mulia. Tokoh aliran ini adalah Epikuros (341-270 SM). Aliran Utilitarisme ialah bahwa kegunaan (*utility*) dari perbuatan tersebut. Jadi aliran ini menilai baik dan buruknya sesuatu perbuatan atas dasar besar kecilnya manfaat yang ditimbulkannya bagi manusia. Jadi tujuannya adalah kebahagiaan (*happiness*), tidak hanya untuk dirinya

melainkan juga orang banyak. Celakanya jika korupsi dipandang sebagai sesuatu yang membahagiakan maka korupsi pun sebenarnya dalam aliran ini adalah sah-sah saja. Pengorbanan masyarakat untuk menebus kebijakan penguasa yang korup pun akhirnya dianggap suatu yang lumrah. Karena pengorbanan dipandang baik jika mendatangkan manfaat, tentu manfaat bagi siapa, bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Tokoh aliran ini adalah J.S. Mill (1806-1872) dengan ungkapannya *“Utility is happiness for the greatest number of sentiment being”* (kebahagiaan untuk jumlah manusia yang sebesar-besarnya). Berbeda dengan aliran “idealisme”. Aliran ini berpendapat bahwa seseorang berbuat baik pada prinsipnya bukan karena dianjurkan orang lain, melainkan atas dasar kemauan sendiri atau rasa kewajiban. Faktor terpenting yang mempengaruhi manusia adalah “kemauan baik” yang melahirkan tindakan konkrit. Dari kemauan baik inilah dihubungkan dengan sesuatu hal yang menyempurkannya yaitu “rasa kewajiban”. Tokoh etika idealisme adalah Immanuel Kant (1725-1804). Kemudian pada aliran etika vitalitas, aliran ini berpendapat bahwa yang menjadi baik buruknya perbuatan manusia, yaitu diukur dengan ada tidaknya daya hidup (vitalitas) yang maksimum, yang mengendalikan perbuatan itu; yang dianggap baik menurut aliran ini yaitu jika seseorang itu kuat, sehingga dapat memaksakan kehendaknya dan sanggup menjadikan dirinya untuk selalu ditaati. Aliran ini mengembangkan kekuatan naluri, insting, yang ada pada diri manusia untuk berjuang (*combative instinct*). Jika dalam suatu sistem kepartaian yang dibangun tidak mencapai elektabilitas sebagai penguasa “tunggal” maka partai-partai akan berkualisii membangun kekuatan (vitalitas) sehingga

kuat untuk berkuasa. Tokoh utama aliran vitalitas adalah Friedrich Neitzche (1844-1900). Pikirannya yang ditonjolkan adalah eksistensi manusia baru sebagai *“ubermensch”* (manusia sempurna) yang berkemauan keras menempuh hidup baru, filsafatnya bersifat *atheistis*, padamasanya, mereka berjuang menentang kaum gereja di Eropa. Lawan dari atheisme adalah aliran “Theologis”, aliran ini berpendapat bahwa yang menjadi ukuran baik dan buruknya perbuatan manusia, didasarkan atas ajaran Tuhan, apakah perbuatan itu diperintahkan atau dilarang oleh Tuhan. Segala yang diperintahkan itu kebaikan, dan segala yang dilarang itu keburukan (perbuatan buruk). Aliran theologis bertalian dengan tiga aliran agama besar dunia, yaitu etika theologies Kristen, etika theologies Yahudi dan etika theologies Islam.

#### D. Etika Theologis Islam

Etika theologies Islam adalah etika yang bersumber dari al-Qur'an dan Al-Hadist. Prinsip-prinsip dasar etika tercantum dalam firman-firman-Nya atau ajaran-ajaran-Nya yang disampaikan kepada Nabi-Nabi-Nya. Sebagai sumber moral atau pedoman hidup dalam Islam yang menjelaskan kriteria baik buruknya sesuatu perbuatan adalah berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah. Al-Qur'an sebagai sumber moral atau pedoman hidup dalam Islam, menjelaskan kriteria baik buruknya sesuatu perbuatan adalah Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Kedua dasar inilah yang menjadi landasan dan sumber ajaran Islam secara keseluruhan sebagai pola hidup termasuk dalam berpolitik. Tujuan luhur etika Islam adalah untuk memperoleh ridha Allah

SWT (*mardlatillah*). Al-Qur'an mengatur jelas dalam kehidupan ummat manusia, baik dalam kehidupan sosial, politik serta kegiatan komunikasinya. Dalam konsep agama etika adalah akhlak. Bagaimana kita harus berakhlak, yang berlaku dalam semua aspek kehidupan. Termasuk aktivitas politik, etika menjadi aturan yang harus ditaati bersama oleh para pelaku politik, sehingga tujuan dari politik itu tercapai tanpa harus saling menyakiti sesama anak negeri.

Etika memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan ummat manusia. Peran tersebut antara lain bahwa etika mampu: (1) mendorong dan mengajak setiap individu untuk berfikir rasional, kritis dalam mengambil keputusan dan melakukan tindakan; (2) etika dalam tataran yang lebih luas, mampu mengarahkan masyarakat untuk berkembang menjadi masyarakat madani, yaitu masyarakat yang tertib, teratur, damai, sejahtera *baladatul tayyibatun warrabbul ghaffur*. Bagi umat Islam sudah seharusnya bahwa fundamental etika yang harus dibangun merujuk kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. "Pada diri Rasulullah terdapat suritauladan yang baik" (Al-Hadist). Tujuan politik dalam Islam tentu tidak hanya mengejar keuntungan materi belaka, akan tetapi yang lebih penting adalah ibadah untuk meraih kejayaan Islam. Islam mengajarkan adanya satu kesatuan antara ibadah dan muamalah. Tidak terpisahkan antar keduanya. Tentu hal ini berbeda dengan politik yang dibangun atas "suka-suka" alias amoral, seperti misalnya yang digambarkan oleh politisi amoral pada umumnya, bahwa antara politik dan etika tidak ada hubungannya sama sekali. Menurutny, keduanya merupakan dua dunia yang berbeda dan tidak bisa dicampuradukan. Dengan kata lain politik

adalah politik, dan tidak dicampuradukan dengan etika. Karena itu wajar, apabila dari mitos politik amoral semacam ini berkembang suatu anggapan bahwa karena kegiatan politik adalah politik, berarti yang menjadikan perhatian mereka hanyalah "memproduksi ide", mengedarkan, menjual, serta membeli "produk" yang menyokong perpolitikannya sehingga keuntungan sebesar-besarnya diperoleh dan tujuan politiknya tercapai.

Dalam etika sosial Islam, untung bukan sebesar-besarnya melainkan pantas. "Wahai Nabi, sesungguhnya Kami mengutusmu untuk menjadi saksi, dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izin Allah, dan untuk menjadi cahaya yang menerangi" (QS. al-Baqarah: 153). Etika komunikasi politik dalam Islam tentu tak lepas dari akhlakul karimah. Penyampai pesan (komunikator) harus memiliki dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika Islam, baik dalam penyampaian informasi secara langsung, kegiatan mengurai data dan fakta, dan kegiatan komunikasi politik lainnya. Etika dalam Islam tak lepas dari pola pikir (*aqliyyah*), pola bersikapnya (*nafsiyyah*), dan perilaku (*amaliyyah*). Merupakan satu kesatuan yang harus sesuai dengan landasan syar'i hukum Islam. "Bawasanya amal itu menurut niat, dan bawasanya bagi setiap manusia (akan memperoleh sesuatu) menurut apa yang diniatkan (*Muttafaq 'alaih*).

Orang-orang dalam berpolitik diharuskan bertindak etis. Harus ada etiket dalam menggunakan sumberdaya yang terbatas, dan apa akibatnya pemakaian sumberdaya tersebut, apa akibatnya dari proses produksi yang ia lakukan. Diharapkan orang melakukan komunikasi politik, memiliki standar etik



dalam kehidupan masyarakat. Etik yang dimiliki oleh masing-masing individu sebenarnya merupakan perkembangan etiket sejak dahulu kala, yang dianut oleh dan disampaikan kepada kita oleh orang tua, guru, pemimpin agama, dan lingkungan sosial kita secara keseluruhan. ...Banyak istilah lain yang senada dengan etika, seperti akhlak, budi pekerti, perangai, tabiat, moral, sopan santun, dan sebagainya. Dalam tradisi filsafat, istilah "etika" lazim dipahami sebagai suatu teori ilmu pengetahuan yang mendiskusikan mengenai apa yang baik dan apa yang buruk berkenaan dengan perilaku manusia. Moralitas berkenaan dengan tingkahlaku yang konkrit, sedangkan etika bekerja dalam level teori. Menurut Komarudin Hidayat, etika bisa dibedakan menjadi dua, yaitu: objektivisme dan subjektivisme. Objektivisme berpandangan bahwa nilai kebaikan suatu tindakan bersifat objektif, terletak pada substansi tindakan itu sendiri. Paham ini melahirkan apa yang disebut paham rasionalisme dalam etika. Suatu tindakan disebut baik, menurut paham ini, bukan karena kita senang melakukannya atau karena sejalan dengan kehendak masyarakat, melainkan semata keputusan rasionalisme universal yang mendesak kita untuk berbuat begitu. Aliran subjektivisme, berpandangan bahwa suatu tindakan disebut baik manakalah sejalan dengan kehendak atau pertimbangan subjek tertentu.

Hal ini tentu senada dengan perkataan akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab, yang diartikan sama dengan budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Pengertian akhlak ialah ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk, antara yang terpuji dan yang tercela, tentang perkataan atau perbuatan

manusia lahir maupun batin. Sebagaimana yang telah disinggung etika berasal dari bahasa Yunani "ethos" yang berarti adat kebiasaan yang merupakan bagian dari filsafat. Menurut *Webster Dictionary* etika adalah ilmu tentang tingkah laku manusia, prinsip-prinsip yang disistematiskan tentang tindakan moral yang betul. Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, akhlak berarti tingkah laku yang lahir dari manusia dengan sengaja, tidak dibuat-buat, dan telah menjadi kebiasaan. Kata akhlak dalam pengertian ini disebutkan dalam al-Qur'an dengan bentuk tunggalnya, khulq.

Letak perbedaan etika dan akhlak ialah bahwa etika merupakan cabang filsafat (hasil pemikiran manusia) sedangkan akhlak ialah suatu ilmu pengetahuan yang mengajarkan mana yang baik dan mana yang buruk, berdasarkan ajaran Allah SWT dan Rasulullah saw. Selanjutnya kata moral, moral berasal dari bahasa Latin "mores" yang berarti tindakan manusia yang sesuai dengan ukuran yang diterima oleh umum. Dalam Bahasa Indonesia, moral diterjemahkan dengan susila, yaitu perilaku yang sesuai dengan pandangan umum, yang baik dan wajar, yang meliputi kesatuan sosial dan lingkungan tertentu. Dengan demikian ada persamaan antara etika dan moral, namun ada pula perbedaannya yaitu etika bersifat teori dan moral lebih banyak bersifat praktis, etika merupakan tingkah laku manusia secara umum (universal) sedangkan moral bersifat lokal atau lebih khusus, lebih sempit.

Sebenarnya inti dari pelanggaran etika dan moral yang dilakukan oleh seseorang dapat dikembalikan kepada masing-masing individu. Individu yang beriman tentu berbeda dengan individu yang tidak beriman. Iman adalah diyakini dalam qalb dan dilakukan dalam perbuatan. Antara

keyakinan dan perbuatan *maching* alias selaras, sama. Dalam literatur Islam banyak sebutan bagi orang yang tidak selaras antara keyakinan dengan perbuatannya, seperti sebutan musyrik, kafir, majusi dan sebutan-sebutan lainnya. Orang yang beriman adalah yang selaras antara perbuatan dan keyakinan. Sehingga dalam berpolitik pun senantiasa mengukur penerimaan Islam dalam dirinya. Agama tidak hanya bersifat simbolis tetapi diyakini dan diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Belum dikatakan beriman seseorang sebelum mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Konsep ini merupakan standar moral yang tinggi, sehingga setiap diri kita tidak mau menipu, ditipu, dirugikan, dikhianati, dan keadaan-keadaan tercelah lainnya, begitu juga halnya dengan orang lain, tidak mau diperlakukan demikian. Dengan demikian Islam akan terasa sebagai rahmat umat manusia tidak hanya bagi ummat Islam, tetapi juga bagi semesta alam seluruhnya. Islam sebagai agama universal dan agama paripura sebagaimana tersirat dalam QS. al-Maidah:3, dan QS. al-Anbiya:107, *pertama*, menyebutkan bahwa Islam adalah nikmat Allah SWT yang telah disempurnakan, dan yang *kedua*, menyatakan bahwa Islam adalah agama rahmat bagi seluruh alam. "Barang siapa yang mengerjakan amal shaleh maka itu untuk dirinya sendiri, dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri, kepada Tuhanmulah kamu dikembalikan". (QS. Al-Jaatsiyah, 45: 15)

Imam Al-Ghazali dalam kitab "*Ihya Ulumuddin*" sebagaimana yang dikutip oleh Ya'qub, mengungkapkan etikanya antara lain sebagai berikut: (a) Akhlak berarti mengubah bentuk jiwa dari sifat-sifat yang buruk kepada sifat-sifat yang baik

sebagaimana perangai ulama, syuhada', shiddiqin dan nabi-nabi; (b) akhlak yang baik dapat mengadakan pertimbangan antara tiga kekuatan dalam diri manusia, yaitu kekuatan berfikir, kekuatan hawa nafsu dan kekuatan amarah. Akhal yang baik acapkali menentang apa yang digemari kebanyakan manusia; (c) akhlak itu kebiasaan jiwa yang tetap yang terdapat dalam diri manusia. Apabila lahir tingkah laku yang indah dan terpuji maka dinamakanlah akhlaq yang baik, dan apabila yang lahir itu tingkah laku yang keji, dinamakan akhlak yang buruk; (d) seseorang yang ingin menulis bagus, pada mulanya harus memaksakan tangannya membiasakan menulis bagus. Apabila kebiasaan itu sudah lama maka paksaan itu tidak diperlukan lagi karena digerakkan oleh jiwa dan pikirannya. Begitu juga dalam berpolitik, jika terbiasa baik maka akan baik, dan celaknya bila orang baik masuk sistem politik yang korup maka ia pun akan bergumul pada keburukan. Karena pada dasarnya setiap diri manusia itu awalnya baik, lingkunganlah yang membuat ia itu jahat.

Politikus yang baik bisa memegang "amanah"

Amanah atau sering juga disebut al-amanah, menurut bahasa berarti: kesetiaan, ketulusan hati, kepercayaan (*tsiqah*) atau kejujuran. Yang dimaksud dengan amanah disini ialah suatu sifat dan sikap pribadi yang setia, tulus hati dan jujur dalam melaksanakan sesuatu yang dipercayakan kepadanya, baik yang berupa harta benda, rahasia, maupun juga tugas kewajiban. Pelaksanaan amanat yang baik dapat disebut dengan sebutan "*al-amin*", yang berarti: dapat dipercaya, yang jujur, yang setia, yang aman.. "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menunaikan amanah kepada yang berhak" (QS. An-

Nisaa'; 4:58). Kewajiban memelihara amanah dengan memiliki sifat dan sikap amanah ditandaskan Rasulullah saw., dalam sabdanya, "Tunaikanlah amanah kepada orang yang beramanah kepadamu, dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang berkhianat kepadamu" (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi). Sabda Nabi ini dibuktikan sendiri, sehingga orang-orang tidak khawatir menitipkan amanah kepada beliau. Itulah sebabnya beliau sejak mudanya diberi gelar "al-Amin", karena beliau seorang yang terpercaya dan memiliki kejujuran dan memelihara amanah.

Lawan dari amanah adalah berkhianat, tidak setia kepada yang dipercayakan kepadanya. *Khianatt* adalah salah satu gejala munafik sebagaimana disabdakan Rasulullah saw., "Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga: apabila berkata dia dusta, apabila berjanji dia mungkir dan jika dipercaya (diamanati) dia khianat" (HR. Muslim). Betapa pentingnya sifat dan sikap amanah ini dipertahankan sebagai cermin akhlak seorang muslim. Jika sifat dan sikap amanah ini telah hilang dari suatu ummat, maka kehancuranlah yang bakal terjadi bagi ummat itu sendiri. Suatu hari sahabat bertanya kepada Rasulullah saw, tentang kapan datangnya saat kehancuran, maka Rasulullah saw menjawab, "Apabila hilang amanah (kesetiaan), maka tunggulah datangnya kehancuran" (HR. Bukhari). Amanah adalah sikap adil, menempatkan sesuatu sesuai dengan kedudukannya dan tidak mengurangi sedikitpun hak-haknya. Amanah merupakan persaksian kepada Allah SWT, nasihat kepada orang-orang muslim, dan menjelaskan kebenaran. "Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka

semuanya enggan memikul amanah itu dan khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh" (QS. Al-Ahzab (33):72).

### Shiddiq

*Shidiq*, sering pula disebut dengan *ash-Shdqah*, berarti benar, jujur; dimaksud di sini adalah berlaku benar dan jujur baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Kewajiban bersifat dan bersikap benar diperintahkan dalam al-Qur'an, "Hai sekalian orang yang beriman, berbaktilah kepada Allah dan jadilah kamu termasuk orang-orang yang benar" (QS. At-Taubah; 9:119). Sikap benar ini adalah salah satu fadhilah yang menentukan status dan kemamuan seseorang dan masyarakat. Menegakkan prinsip kebenaran adalah salah satu sendi kemaslahatan dalam hubungan antara manusia dengan manusia dan antara satu golongan dengan golongan lainnya. Abdullah bin Mas'ud r.a. memberitahukan bahwa Nabi saw bersabda, "Sesungguhnya kebenaran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Seseorang yang membiasakan diri berkata benar hingga tercatat di sisi Allah sebagai *shiddiq* (orang-orang yang benar) (*Muttafaq 'alaih*). Abu Muhammad (al-Hasan) bin Abi Thalib r.a., berkata bahwa ia telah menghafal dari ajaran Rasulullah saw., "Tinggalkanlah yang engkau ragukan kepada apa yang tidak engkau ragukan. Sesungguhnya kebenaran membawa kepada ketenangan dan dusta itu menimbulkan keraguan" (HR. At-Tirmidzi). Ketika surat Rasulullah saw diterima Raja Rum dari Baitul Muqaddas, Heraclius, ia panggil orang-orang Arab yang berasal dari Mekah yang sedang berdagang di negeri itu untuk ditanya tentang pribadi Rasulullah saw.

Heraclius berkata,”... aku bertanya tadi, adakah kamu tuduh Muhammad pernah berdusta sebelum ia mengaku menjadi Nabi?”. Lantas kamu jawab,” Tidak”. Maka aku berpendapat bahwa orang yang tidak berdusta kepada manusia tidak bisa jadi berdusta atas nama Allah”.

### Dusta

Sebagai kebalikan dari kebenaran dan kejujuran adalah dusta alias curang. Sifat dan sikap ini membawakepada bencana dan kerusakan bagi pribadi dan masyarakat. Rasulullah saw menyampaikan, ”Sesungguhnya dusta membawa kepada keburukan dan keburukan itu membawa ke neraka. Dan sesungguhnya seseorang yang mebiasakan dirinya berdusta niscaya tercatat di sisi Allah sebagai tukang dusta” (*Muttafaq’alaih*). Dalam masyarakat yang merajalela akan dusta dan kecurangan, akibatnya adalah kacau balau dan kalut. Kecurangan dan keculasan dalam bidang kehidupan, termasuk dalam kegiatan bisnis akan mempercepat kehancuran masyarakat itu sendiri. Satu-satunya jalan untuk mencegahnya adalah mengembalikan keadaan itu kepada prinsip-prinsip kebenaran. Dapat dibayangkan akibat-akibat yang bakal terjadi jika kebohongan dan keculasan itu membudaya di masyarakat. Misalnya sukatan dan timbangan dikurangi. Manipulasi dalam jual beli, penambahan zat yang membahayakan bagi kesehatan konsumen, dll.

Dalam berbagai Ayat, Allah SWT memperingatkan akan bahaya dan dosa atas kecurangan dan keculasan seperti mengurangi timbangan. Allah menunjukan jalan yang lurus, jalan yang aman, berkah dan tenteram, yakni kejujuran dan kebenaran baik perkataan maupun dalam perbuatan, menegakkan

neraca dengan jujur dan apabila dilakukan hutang piutang, maka hendaklah ditulis (dicatat) dengan saksi-saksi yang jujur. Jika prinsip kebenaran dan kejujuran telah tegak, membudaya dalam kehidupan masyarakat yang harmonis, aman, dan damai, karena berkata dan bertingkah laku yang benar. ”Allah meneguhkan kedudukan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh dalam kehidupan dunia ini dan di hari kemudian. Dan Allah membiarkan sesat orang-orang yang salah, dan Allah berbuat apa-apa yang dikehendaki-Nya” (QS. Ibrahim; 14:27).

### Menepati Janji

Sebagai rangkaian dari sikap amanah dan benar adalah menepati janji (*al-Wafa’*), hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur’an, ”Diantara orang yang beriman ada beberapa orang yang menepati apa yang telah dijanjikan kepada Allah” (QS. Al-Ahzab; 33: 23).

### Keadilan

Prinsip keadilan ditegaskan dalam Al-Qur’an, ”Sesungguhnya Allah memerintahkan manusia berlaku adi dan kebaikan” (QS. An-Nahl; 16: 90). Sikap adil baik berhubungan dengan perseorangan maupun juga dengan masyarakat luas. Adil perseorangan adalah tindakan memberi hak kepada yang mempunyai hak. Adil pada masyarakat misalnya dalam menegakkan hukum, keadilan. ”Hai orang-orang yang beriman! Hendaklah kalian berdiri lurus karena Allah menjadi saksi atas keadilan. Janganlah kebencian suatu kaum menyebabkan kalian tidak menjalankan keadilan. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan patuhlah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu tahu betul apa-apa yang kalian”

(QS. Al-Maidah; 5: 8). Sebagai pelopor dari keadilan yang menjadi *uswatun hasanah* adalah pribadi Nabi kita Muhammad saw, dimana semua gerak-geriknya, perkataan dan keputusannya semua memancar dari mata air keadilan. Rasulullah berlaku adil meskipun kepada keluarganya sendiri. Beliau pernah bersabda, "Jika sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku potong tangannya" (HR. Bukhari). Keadilan adalah sendi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu jika prinsip keadilan ini ditegakkan, niscaya akan terwujudlah kesejahteraan dan keamanan serta kemakmuran pada masyarakat.

Lawan dari keadilan adalah kedzaliman. Jika adil sebagai sifat dan sikap fadlilah, maka kezaliman adalah gabiha, yaitu sifat dan sikap dzalim. Dzalim berarti menganiaya, tidak adil dalam memutuskan perkara, berat sebelah dalam tindakan, mengambil hak orang lebih dari batasan atau memberikan hak orang kurang dari semestinya. Sifat dzalim ini diancam dengan firman Allah SWT, "...Orang-orang yang dhalim tidak mempunyai teman setia seorompokun dan tidak pula mempunyai seorang pemberi *syafa'at* yang diterima syafaatnya. Allah mengetahui mata yang berkhianat, dan apa yang disembunyikan dalam dirinya (*quluub*)" (QS. Al-Mu'minin; 40:18-19). Rasulullah saw bersabda, "Peliharalah dirimu daripada kedhaliman. Karena dhalim itu merupakan kegelapan di hari qiamat" (HR. Muslim). Aisyah berkata bahwa Rasulullah saw pernah bersabda, "Siapa yang mengambil hak orang lain, walaupun sejenkal tanah, akan dikalungkan pada hari kiamat hingga tujuh petala langit" (*Muttafaq' Alaih*).

### Jujur

"Sesungguhnya kejujuran itu akan

membawa kepada kebaikan, sedangkan kebaikan itu akan menuntun ke surga. Dan seorang laki-laki yang berbuat jujur akan ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu membawa kepada kejahatan, dan kejahatan itu akan mengantarkan ke neraka. Seorang laki-laki yang berbuat dusta akan ditulis di sisi Allah sebagai pendusta" (HR. Bukhari Muslim). Seorang Muslim yang benar adalah Muslim yang senantiasa berusaha untuk bersikap jujur, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Ia tidak boleh takut berkata benar sekalipun berisiko. "Sampaikanlah kebenaran walaupun pahit" (HR. Baihaki). Setiap muslim yang tidak jujur tak pantas mengaku sebagai sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang *al-amin* (terpercaya) dan *ash-shiddiq* (jujur). Sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan kita kepada keselamatan. Bersikap jujur dan lurus, maka Allah SWT akan memberi pahala surga, "Sesungguhnya mereka yang telah mengakui." Allah Tuhan kami", Kemudian berlaku lurus dalam pengakuan itu, akan turun malaikat kepadanya (untuk menghibur mereka dengan kata-kata), "Janganlah berduka cita, bergembiralah kalian dengan surga yang dijanjikan Allah kepada kalian" (QS. Fussilat; 41: 30).

### E. Penutup

Prinsip-prinsip etika Islam ini seharusnya menjadi fondasi dasar dalam pembangunan etika moral para elit politik kita, sehingga mampu membangun bangsa yang beradab, aman, tentram dan damai. Menurut Syauki Bey, penyair Arab, "Suatu bangsa dikenal karena akhlaknya (budi pekertinya). Jika budi pekertinya telah runtuh, maka runtuh pula bangsa itu".



## E. Daftar Pustaka

- Al-Qur'an dan Terjemahannya. 1992. Edisi Revisi. Bandung: Gema Risalah Press
- Azra, Azyumardi. 1999. Konteks Berteologi di Indonesia, Jakarta: Paramadina.
- Cangara, Hafied. 2000. Pengantar Ilmu Komunikasi. Cetakan Kedua. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Effendi, Onong Uchyana. 1993. Ilmu, Teori & Filsafat Komunikasi. Cetakan ke I. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- , 1998. Ilmu Komunikasi Teori dan Praktik. Cetakan Kesebelas. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- 1989. Kamus Komunikasi. Bandung. Mandar maju.
- Gunara, Thorik. 2009. Komunikasi Rasulullah. Indahnya Berkomunikasi ala Rasulullah. Cetakan Pertama. Bandung. Simbiosis Rekatama Media.
- Johannesen, Richard L. 1996. Etika Komunikasi. Terjemahan. Cetakan Pertama. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Marzuki, Kamaluddin. 1992. 'Ulum Al-Qur'an. Cetakan Kedua. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Natsir, Nanat Fatah, 2010. Moral dan Etika Elit Politik. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Nuridin, dkk. 1993. Moral dan Kognisi Islam. Edisi ke-1. Bandung: Alfabeta.
- Rais, Amin. 1999. Menyembuhkan Bangsa Yang Sakit, Yayasan Bentang Budaya. Yogyakarta.
- Rakhmat, Jalaluddin, 2006. Retorika Modern, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Saefullah, Ujang. 2007. Kapita Selekta Komunikasi: Pendekatan Budaya dan Agama. Cetakan pertama. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Sudarman, Paryati. 2008. Menulis di Media Massa. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sumarno, AP. 1989. Dimensi-Dimensi Komunikasi Politik", Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Susanto, Astrid S. 1995. Filsafat Komunikasi. Cetakan kelima. Bandung: Binacipta.
- Syarifuddin, Amir. 2001. Ushul Fiqh, jilid 2. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.